

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

Mulia Andirfa dan Muhammad Zubir
Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

In an organization, especially government organizations related to efforts to achieve the stated goals, can not be separated from the existence of elements of human resources as the driving force of the organization. Human resources determine whether or not walking, in addition to the availability of facilities and infrastructure. Organizations need quality human resources to be able to achieve their intended goals. So that there are qualified human beings or human beings who are effective and successful, need to sharpen human resources. Good governance is a form of success in carrying out the task of building the country in accordance with the planned goals. To achieve this goal every government must be able to manage the resources that exist in the country, one of the most important of which is finance. Government Accounting Standards (SAP) are accounting principles applied in preparing and presenting government financial reports so that Government Accounting Standards is a requirement that has the power law in an effort to improve the quality of government financial reports in Indonesia. This is supported by a statement in Law Number 32 of 2004 article 184 paragraph (3) concerning Regional Government stating: "The financial statements of the Regional Government are prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards stipulated by Regional Regulations." With reference to Standards Accrual-based Government Accounting, it is expected that the financial statements produced will be comparable and useful for evaluating government performance. Then it can be stated that the application of accrual-based SAP will improve the quality of financial statements. Data analysis used in this study through multiple linear regression.

Keywords: *Accrual-Based Government Accounting Standards, Good Governance, Quality of Financial Statements*

A. Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat

dipertanggung jawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang. Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Friska, David, dan Stanly (2005:2) Seiring dengan diterapkannya SAP Berbasis AkruaI baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.65 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun Anggaran 2015. (Humas Aceh 15/09/2015) Sekda menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung sistem pelaporan ini karena lebih mudah dibaca dan ditelusuri keabsahannya.

Menurut Rochman (2009:276) *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Dalam konsep Syari'at Islam yang berlaku di Aceh

implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam yang berlaku sehingga pelaksanaannya terbukti efektif untuk dijalankan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di pemerintahan Provinsi Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* sesuai dengan Hukum Islam yang ada di Aceh. Prinsip *Good Governance* pertama profesionalisme dimana setiap pejabat atau pegawai birokrasi yang bekerja di pemerintahan Aceh diuntut untuk profesional yaitu bekerja dengan memiliki keahlian di bidangnya atau dalam prinsip Syariat Islam disebut Fathanah yaitu Cerdas, mampu, atau menguasai yaitu dengan kecerdasannya seseorang menjadi profesional yang dapat melihat dan mampu bersifat berfikir positif (khusnuzhon), menjaga hubungan baik dengan orang lain (silaturahmi) dan mampu manajemen waktu serta tidak ingkar janji (selalu menepati janji). Bahkan dalam prinsip Syariat Islam profesionalitas sangat dianjurkan kepada seluruh tenaga kerja baik di kantor pemerintahan atau dimana saja, Syariat Islam tidak pernah mempertentangkan profesionalitas dalam prinsip *Good Governance* ini mengingat bekerja dengan baik dan benar menurut Islam adalah ibadah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, SAP harus diaplikasikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010. Artinya bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2010 sudah harus sesuai dengan SAP. Setiap negara pasti membutuhkan

pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Baswir (2000:7), Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan

pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan Laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dan informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Arif ardi kusumah, 2013 menyatakan Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam

tanggungjawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD seelambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2017 "BPKP sebagai bagian dari pemerintahan dan aparat internal auditor punya tanggung jawab moral, untuk membantu PEMDA dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi dengan membangun SIMDA sejak tahun 2002. SIMDA hanya sebatas tools, sehingga hasilnya sangat tergantung pada kejujuran dan intergritas dari pimpinan daerah masing-masing dalam menyajikan informasi berdasar sistem yang baik, tentunya diharapkan agar tidak ada rekayasa transaksi keuangan. SIMDA dapat membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, karena SIMDA sudah menyeluruh, mulai Penganggaran sampai Pelaporan." Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atau "WDP" terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016. Hal itu menurun dibandingkan LKPD Lhokseumawe Tahun Anggaran (TA) 2015 yang mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "WTP" dari BPK.

Disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. keuangan negara atau daerah menurut Undang-undang RI no 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Dalam suatu organisasi terutama oragnisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya.

Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia- manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya menajamen sumber daya manusia (MSDM) (Mia, Kharis dan Rita:2016).Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 184 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Dengan mengacu pada SAP berbasis akrual maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya penerapan SAP berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dari Alasan tersebut Penulis mengambil Judul Tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah kota Lhokseumawe.

B. Landasan Teori

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005:134) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan

lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Arif (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Halim (2010:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tujuan untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015.

2. Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan SAP. SAP ditetapkan di lingkup Pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah, jika menurut Peraturan Perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

Menurut Bastian (2010:77) mengatakan bahwa kandungan yang berada pada akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan

pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPE/DPRD (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Indra Bastian (2005:117) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga mempunyai kewajiban

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Menurut Nordiawan (2006:35) Akuntansi pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan RI.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan

basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

6. Pengertian *Good Governance*

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank

(Sedarmayanti, 2009:273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengandemokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yanglangka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankandisiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagitumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

7. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Menteri BUMN No. PER/01/MBU/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 yaitu Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *Good Governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada

sembilan aspek fundamental dalam pewujudan *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Responsif (*Responsiveness*)
5. Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)
7. Efektivitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

8. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (tertuang dalam PP No.71 Tahun 2010).

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat didalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:132) mengemukakan bahwa "macam-macam skala pengukuran dapat

berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio". Penelitian ini menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2010:98) adalah "skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur".

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 17. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono (2013:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut:

"Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan."

Adapun analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe
2. Menganalisis *Good Governance* pada Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe
3. Menganalisis Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe, baik secara simultan maupun parsial.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui regresi linear berganda. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Menurut Sugiyono (2013:277) mendefinisikan bahwa: "Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasinya (dinaik-turunkannya)". Persamaan regresi berganda untuk dua prediktor yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 α = Koefesien konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefesien regresi
 χ_1 = Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
 χ_2 = *Good Governance*
 e = Tingkat kesalahan (*error*)/Pengaruh faktor lain

D. Pembahasan

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama didapat bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008), yaitu penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintah daerah kota Lhokseumawe dibuktikan dengan membandingkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,818 > 1,69$. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintah daerah kota Lhokseumawe.

Standar akuntansi pemerintah ini sangat diperlukan guna menjamin konsistensi dalam laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan

pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua didapat bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empiris studi yang dilakukan oleh Manuppan (2015) pada hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pengaruh *good governance* (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe sebagai hipotesis penelitian dibuktikan dengan membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7.810 > 1,69$. Artinya terdapat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe. Ini dapat dilihat dari hasil output SPSS uji t.

Signifikan dari pengujian ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Dari sisi kuantitas, para akuntan atau pegawai dengan latar belakang

pendidikan akuntansi, seiring dengan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Ini memberdayakan pegawai yang ada dalam satuan kerja tersebut.

Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe.

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe

Untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe menggunakan regresi linear berganda.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual dan *Good Governance* merupakan salah satu pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki. Sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Sehubungan

dengan permasalahan tersebut di atas, menunjukkan bahwa setelah pemerintah daerah yang menerapkan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan *Good Governance* secara konsisten dan menyeluruh, maka itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa dari pengujian hipotesis yang diuji berdasarkan uji F dan uji t bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. maka hasil penelitian tolak H_0 dan terima H_a . Dapat disimpulkan secara simultan/bersama-sama dan secara parsial/sebagian standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X_1) dan *Good Governance* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.
2. Penerapan *Good Governance* berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penelitian penerapan *Good Governance* agar pengelolaan uang rakyat (*Public money*) dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Sedangkan hasil pengujian secara simultan dan parsial didapat bahwa hasil Pengaruh Standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI dan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.

F. Daftar pustaka

Abdul, Halim, (2001). *Analisa Laporan Keuangan*, AMP YKPM Yogyakarta.

Abdul Hafiz Tanjung.(2012).*Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*.Bandung: Alfabeta

Abdul, Halim, (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat

Algra, et.al.(1983), *Kamus Istilah Hukum (Fockema Andreae)*, Jakarta : Binacipta 2010

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Hafiz Tanjung, (2008), *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Harun Al Rasyid, 1994, Teknik Penarikan Sampel dan penyusunan Skala*, Bandung: Program Pasca Sarja Universitas Padjajaran

Arif Ardi Kusumah (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*

Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*.

Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Baswir, Revrisond, (2000), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPF, Yogyakarta.

Bahtiar, Arif, Muchlis, Iskandar, (2002). *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.

Binsar H. Simanjuntak. (2010). *Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia*.Jakarta : Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta

Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2003) *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Batubara, Alwi Hasyim. (2006) *Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari-April.

Belkaoui, Ahmed Riahi (2006) *Accounting Theory*. Teori Akuntansi. Edisi Kelima Jakarta Salemba Empat.

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.

Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, dan Stanly Winyilson Alexander (2015).

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

- Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 1-8. ISSN 2303-1174
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kusnadi (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Koiman (2003) *Governing as Governance* SAGE
- Kuswadi. (2004). *Cara Mengukur Kepuasan Karyawan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mia Oktarina, Kharis Raharjo SE M.Si.Ak, Rita Andini, SE MM (2016) *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang* Journal of Accounting Volume 2 No.2 Maret 2016
- Moh Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- PSAK. (2009). *Pengukuran kinerja instansi pemerintah. Modul sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Edisi Revisi. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- PSAP. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Revisi Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*
- Siti Indah Dhiyani (2017) *Pengaruh Kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap penerapan good governance* Jom FEKON Vol.4 No.1 Februari 2017
- Sugiyono. (P2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5* Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*
- BAPPENAS and UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. (2004). *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS- Statistic Indonesia.